



LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI UNAUDITED TAHUN 2023



Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



KATA PENGANTAR

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan yang berisi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta Suku Badan Kepegawaian Daerah dan UPT. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 28 Maret 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Maria Qibtya

NIP 196507191985032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	6
BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI	8
2.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	8
2.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	8
2.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	8
2.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP.....	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	16
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	16
3.2 Realisasi dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan	17
3.3 Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai	21
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	24
3.1. Laporan Realisasi Anggaran	24
3.1.1. Pendapatan	24
3.1.2. Belanja	24
3.1.2.1. Belanja Pegawai.....	24
3.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa.....	25
3.1.2.3. Belanja Hibah.....	26
3.1.2.4. Belanja Modal.....	27
3.2. Neraca	27
3.2.1. Aset	28
3.2.1.1 Aset Lancar.....	28
3.2.1.2 Investasi Jaka Panjang.....	30
3.2.1.3 Aset Tetap.....	30
3.2.1.4 Dana Cadangan.....	32
3.2.1.5 Aset Lainnya.....	32
3.2.2. Kewajiban	33
3.2.3. Ekuitas	34
3.3. Laporan Operasional	34
3.3.1. Kegiatan Operasional	35
3.3.1.1. Pendapatan LO	35

3.3.1.2. Beban Operasi	35
3.4. Laporan Perubahan Ekuitas	38
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	40
4.1. Penjelasan Umum	40
4.1.1. Struktur Organisasi	41
4.1.2. Domisili	41
4.2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.....	41
BAB VI PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 - Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap	15
Tabel 3.1 - Capaian Realisasi Anggaran Keuangan 2023.....	16
Tabel 4.1 - Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	25
Tabel 4.2 - Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	26
Tabel 4.3 - Rincian Belanja Hibah Tahun 2023.....	27
Tabel 4.4 – Realisasi Belanja Modal Tahun 2023.....	27
Tabel 4.5 – Aset Lancar Tahun 2023.....	28
Tabel 4.6 – Persediaan.....	29
Tabel 4.7 – Aset Tetap 2023.....	30
Tabel 4.8 – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	31
Tabel 4.9 – Aset Lainnya.....	32
Tabel 4.10 – Ekuitas.....	33
Tabel 4.11 – Rekapitulasi Beban Operasi Tahun 2023.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar Realisasi Perjanjian Kinerja BKD 2023
Lampiran	2	Daftar Realisasi Hibah
Lampiran	3	Daftar KIB
Lampiran	4	Daftar Stockopname Persediaan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (Unaudited) Tahun 2023 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 28 Maret 2024

Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta



Maria Qibtya

NIP 196507191985032002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 (UNAUDITED)



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(LRA)**



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2023	REALISASI Tahun 2023	(%)	REALISASI Tahun 2022
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		122.859.144.757,00	121.024.811.986,00	98,51	586.466.284.606,00
Belanja Barang dan Jasa		20.134.839.060,00	17.073.171.895,00	84,79	13.804.938.213,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		3.699.557.260,00	3.416.591.225,00	92,35	3.272.132.658,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		146.693.541.077,00	141.514.575.106,00	96,47	603.543.355.477,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.635.233.390,00	2.575.913.603,00	97,75	2.393.631.270,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		2.635.233.390,00	2.575.913.603,00	97,75	2.393.631.270,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2023	REALISASI Tahun 2023	(%)	REALISASI Tahun 2022
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		149.328.774.467,00	144.090.488.709,00	96,49	605.936.986.747,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(149.328.774.467,00)	(144.090.488.709,00)		(605.936.986.747,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		(149.328.774.467,00)	(144.090.488.709,00)		(605.936.986.747,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 25 Maret 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(Signature)
DRA. MARIA QIBTYA, M.SI
 NIP. 196507191985032002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 (UNAUDITED)



NERACA



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada BLUD		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		0,00	0,00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka		20.318.595,00	8.194.127,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka		20.318.595,00	8.194.127,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		1.067.747.194,00	873.827.950,00
Barang Pakai Habis		1.067.747.194,00	873.827.950,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		1.088.065.789,00	882.022.077,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Pencertaan Modal		0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah		0,00	0,00
Peralatan dan Mesin		24.076.573.949,00	21.399.621.801,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		155.295.450,00	155.295.450,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(19.790.561.779,00)	(18.381.224.499,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(19.676.381.779,00)	(18.267.044.499,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(114.180.000,00)	(114.180.000,00)
JUMLAH ASET TETAP		4.441.307.620,00	3.173.692.752,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		1.382.830.540,00	1.183.021.437,00
Aset Rusak Berat/Usang		1.281.902.940,00	1.082.093.837,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		100.927.600,00	100.927.600,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(1.350.277.232,00)	(1.149.871.929,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(1.249.349.632,00)	(1.048.944.329,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		(100.927.600,00)	(100.927.600,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		32.553.308,00	33.149.508,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		5.561.926.717,00	4.088.864.337,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspem		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame		0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran		0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman		0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas		0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Dacrah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja		6.058.707.137,00	6.185.490.813,00
Utang Belanja Pegawai		6.058.707.137,00	6.185.490.813,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		0,00	0,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		6.058.707.137,00	6.185.490.813,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		6.058.707.137,00	6.185.490.813,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		(145.006.340.429,00)	(608.033.613.223,00)
Ekuitas SAL		0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		144.509.560.009,00	605.936.986.747,00
RK PPKD Kas		144.090.488.709,00	605.936.986.747,00
RK PPKD Non Kas		419.071.300,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		(496.780.420,00)	(2.096.626.476,00)
JUMLAH EKUITAS		(496.780.420,00)	(2.096.626.476,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.561.926.717,00	4.088.864.337,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 25 Maret 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI
JAKARTA



DRA. MARIA OIBTYA, M.SI
NIP. 196507191985032002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 (UNAUDITED)



LAPORAN OPERASIONAL (LO)



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
40301000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (Gabungan)
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO					
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO					
Pendapatan Hibah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN					
BEBAN OPERASI					
Beban Pegawai		141.124.282.838,00	604.023.341.713,00	(462.899.058.875,00)	(76,64)
Beban Barang dan Jasa		120.898.028.310,00	587.091.812.528,00	(466.193.784.218,00)	(79,41)
Beban Barang		16.809.663.303,00	13.659.396.527,00	3.150.266.776,00	23,06
Beban Jasa		5.072.103.820,00	3.421.137.481,00	1.650.966.339,00	48,26
Beban Pemeliharaan		11.379.354.878,00	9.864.123.320,00	1.515.231.558,00	15,36
Beban Bunga		358.204.605,00	374.135.726,00	(15.931.121,00)	(4,26)
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		3.416.591.225,00	3.272.132.658,00	144.458.567,00	4,41
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi					
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		1.783.219.807,00	1.832.922.865,00	(49.703.058,00)	(2,71)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.783.219.807,00	1.810.086.865,00	(26.867.058,00)	(1,48)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	22.836.000,00	(22.836.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER					
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		142.907.502.645,00	605.856.264.578,00	(462.948.761.933,00)	423,95
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(142.907.502.645,00)	(605.856.264.578,00)	462.948.761.933,00	(76,41)
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO					
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER					
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
40301000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (Gabungan)
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		(142.907.502.645,00)	(605.856.264.578,00)	462.948.761.933,00	(76,41)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 25 Maret 2024
Kepala
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DRA. MARIA QIBTYA, M.SI
NIP. 196507191985032002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 (UNAUDITED)



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(LPE)**



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
Ekuitas - LO			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2022 dan 2021		(608.033.613.223,00)	(340.587.996.149,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		605.936.986.747,00	338.410.647.504,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2023		(2.096.626.476,00)	(2.177.348.645,00)
RK PPKD			
RK PPKD per 31 Desember 2022 dan 2021		605.936.986.747,00	338.410.647.504,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(605.936.986.747,00)	(338.410.647.504,00)
RK PPKD per 1 Januari 2023		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		(2.096.626.476,00)	(2.177.348.645,00)
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(142.907.502.645,00)	(605.856.264.578,00)
Mutasi RK PPKD		144.509.560.009,00	605.936.986.747,00
Koreksi Ekuitas		(2.211.308,00)	0,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		1.599.846.056,00	80.722.169,00
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		(145.006.340.429,00)	(608.033.613.223,00)
RK PPKD		144.509.560.009,00	605.936.986.747,00
EKUITAS AKHIR		(496.780.420,00)	(2.096.626.476,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

DRA. MARIA QIBTYA, M.SI
NIP. 196507191985032002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 (UNAUDITED)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (Audited).

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah dan

Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 adalah berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi DKI Jakarta selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai belanja, *surplus/defisit*, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan kenaikan/penurunan ekuitas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
2. Perubahan posisi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
 17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
 19. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang

Kebijakan Akuntansi;

20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
23. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1201 Tahun 2023 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2023;
24. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 dibagi ke dalam 5 (lima) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja

keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.

BAB V : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

BAB VI : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku SKPD merupakan entitas akuntansi, karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

2.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Badan Kepegawaian Daerah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kepegawaia Daerah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat

perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

2.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Kepegawaia Daerah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaia Daerah adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2.4.2 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2.4.3 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.4.4 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.4.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

2.4.5.1 Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

2.4.5.2 Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi dengan berpedoman Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017, didalamnya dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

2.4.5.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

2.4.5.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

2.4.6 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

2.4.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

2.4.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

2.4.9 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- d. Buku-buku dan perpustakaan
- e. Hewan ternak dan tanaman

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan.

Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang tabel masa manfaat (umur ekonomis) aset tetap.

Tabel 2.1 Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak Disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	5
5.4	Hewan/ Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset tetap - renovasi	Masa kerja sama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta memperoleh anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp149.328.774.467,00. Berikut Realisasi pencapaian target keuangan pada Tahun 2023:

Tabel 3.1 Capaian Realisasi Anggaran Keuangan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2023	%
1	3	4	5
PENDAPATAN	-	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	122,859,144,757	121,024,811,986	98.51
Belanja Barang & Jasa	20,134,839,060	17,073,171,895	84.79
Belanja Hibah	3,699,557,260	3,416,591,225	92.35
Jumlah Belanja Operasi	146,693,541,077	141,514,575,106	96.47
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	2,635,233,390	2,575,913,603.00	97.75
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	2,635,233,390.00	2,575,913,603.00	97.75
JUMLAH BELANJA	149,328,774,467	144,090,488,709	96.49

Realisasi pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2023 sudah mencapai hasil yang maksimal. Hal ini tergambar pada Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 149.328.774.467,00 terealisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp144.090.488.709,00 atau 96,49%.

3.2. Realisasi dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Keterangan
Total Belanja BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023				149.328.774.467	144.090.488.709	96,49%	
1	Program Kepegawaian Daerah	Total Belanja Program Kepegawaian Daerah		19.917.457.708	16.613.802.813	83,41%	
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit		364.850.000	348.400.000	95,49%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	67.200.000	64.800.000	96,43%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	40.200.000	40.200.000	100,00%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	171.400.000	169.000.000	98,60%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembinaan Disiplin ASN	37.200.000	37.200.000	100,00%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	14.400.000	14.400.000	100,00%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Disiplin ASN	34.450.000	22.800.000	66,18%	
		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit		13.555.773.248	10.896.611.460	80,38%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	62.850.000	62.250.000	99,05%	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3.566.111.390	1.404.043.800	39,37%			

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Keterangan
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	817.400.000	816.200.000	99,85%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	8.146.400.595	7.659.762.335	94,03%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	451.145.773	447.490.000	99,19%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	511.865.490	506.865.325	99,02%	
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit		1.741.719.740	1.285.531.633	73,81%	
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	410.519.740	304.956.633	74,29%	
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	573.250.000	560.850.000	97,84%	
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	757.950.000	419.725.000	55,38%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit		4.255.114.720	4.083.259.720	95,96%	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	4.030.114.720	3.876.259.720	96,18%	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	190.200.000	190.200.000	100,00%	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	34.800.000	16.800.000	48,28%	
2	Program Penunjang	Total Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		129.411.316.759	127.476.685.896	98,51%	

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Keterangan
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi						
	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan			129.411.316.759	127.482.913.096	98,51%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	122.859.144.757	121.024.811.986	98,51%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.882.000	26.100.000	93,61%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.469.393.558	2.437.736.962	98,72%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.122.545.539	1.109.248.417	98,82%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.180.538	99.531.156	94,63%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72.238.800	69.352.800	96,00%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	407.284.641	399.812.589	98,17%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	102.950.000	102.950.000	100,00%	akumulasi dengan Unit Perangkat	

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Keterangan
							Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		460.631.600	458.402.000	99,52%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		198.562.440	198.440.000	99,94%	
	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			974.536.240	973.015.720	99,84%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		531.016.240	531.016.240	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		443.520.000	441.999.480	99,66%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			376.686.933	370.860.205	98,45%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		131.745.998	127.682.009	96,92%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		244.940.935	243.178.196	99,28%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien			2.703.673.271	2.644.161.023	97,80%	

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Keterangan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.731.609.726	1.673.299.523	96,63%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	972.063.545	970.861.500	99,88%	

3.3. Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta secara konsisten terus meningkatkan kualitas layanan kepegawaian kepada segenap Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, oleh karenanya permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian program/kegiatan di tahun 2023 menjadi bahan evaluasi penyempurnaan layanan kepegawaian di tahun mendatang.

Persentase penyerapan tahun 2023 ini menurun apabila dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi dengan tingkat persentase sebesar **99,28%**. Hal tersebut disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan yang realisasi anggarannya belum optimal sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Penjelasan Realisasi Tidak Optimal
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Disiplin ASN	34.450.000	22.800.000	66,18%	Realisasi anggaran tidak optimal karena sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran kode etik/kode perilaku ASN yang perlu ditindaklanjuti oleh Tim Majelis Kode Etik (khususnya kategori pelecehan seksual) yang dalam proses tindaklanjutnya memerlukan pendampingan narasumber psikolog forensik.
Mutasi dan Promosi ASN		Pengelolaan Promosi ASN	757.950.000	419.725.000	55,38%	Pada aktivitas seleksi terbuka jabatan rencana untuk mengisi beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong di triwulan IV tidak terealisasi karena belum adanya rekomendasi dan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sehingga anggaran honorarium tim panitia seleksi tidak dapat direalisasikan secara optimal. Sementara itu, pada aktivitas Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah/Pelantikan Pejabat Struktural di BKD dan 5 Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi target pelaksanaan sidang baperjab dan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan struktural tidak dapat terealisasi sebanyak 12 kali sebagaimana yang telah ditargetkan karena pelaksanaan pengangkatan, Pemindehan dan pemberhentian jabatan struktural membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Kepala BKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Normas, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.	
Pengembangan Kompetensi ASN		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	34.800.000	16.800.000	48,28%	Realisasi anggaran tidak optimal karena pelaksanaan Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Kepala BKN sebagaimana	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Penjelasan Realisasi Tidak Optimal
							diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Normas, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN sehingga target pelaksanaan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan fungsional tidak dapat terealisasi sebanyak 12 kali sebagaimana yang telah ditargetkan
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3.566.111.390	1.404.043.800	39,37%	Realisasi anggaran tidak optimal karena terdapat perubahan titik lokasi ujian pada tahapan seleksi kompetensi, yang semula direncanakan 2 titik lokasi menjadi hanya 1 titik lokasi disesuaikan dengan jumlah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan mengikuti seleksi kompetensi sebanyak 8.424 orang, sehingga anggaran untuk sarana dan prasarana pendukung (sewa laptop, meja, AC satandaing, makan dan minum panitia serta honorarium pengawas ujian tidak dapat terealisasi optimal.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilaikekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

4.1.2. Belanja

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (performance-based budgeting), yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan.

Realisasi belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 144.090.488.709,00 atau 96,49% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 149.328.774.467,00.

4.1.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 121.024.811.986,00 menurun sebesar 465.441.472.620,00 atau 79,36% dibandingkan belanja pegawai pada 31 Desember 2022 sebesar Rp 586.466.284.606,00. Hal ini disebabkan sudah tidak ada adanya pembayaran gaji dan TPP P3K dan CPNS pada tahun 2023, karena sudah dilimpahkan di masing-masing SKPD

sesuai penempatannya.

Rincian realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.1

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI BELANJA PEGAWAI	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BELANJA PEGAWAI	121,024,811,986	586,466,284,606
Gaji Pokok	11,909,593,140	247,557,137,958
Tunjangan Keluarga	1,010,239,770	7,942,176,214
Tunjangan Jabatan	437,540,000	553,100,000
Tunjangan Fungsional	520,814,000	25,586,479,000
Tunjangan Umum	424,625,000	1,075,965,000
Tunjangan Khusus (PPH)	9,893,385,202	9,842,954,261
Tunjangan Beras	661,846,380	9,718,401,900
Pembulatan Gaji	154,841	239,681
TPP beban kerja	2,555,763,088	2,763,325,000
TPP Prestasi Kerja	67,877,535,997	256,312,997,097
Iuran JKK-JKM	25,733,314,568	25,113,508,495

4.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk barang dan/atau jasa yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang menurut sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari 1 (satu) tahun.

Realisasi Belanja Barang & Jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17.073.171.895,00 dan Rp13.804.938.213,00. Kenaikan Realisasi Belanja Barang & Jasa sebesar Rp3.268.233.682 atau sebesar 23.67% disebabkan pada tahun 2023 berdasarkan peraturan Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2022 bergabungnya satuan pelaksana KORPRI wilayah ke dalam Suku Badan Daerah Kota sehingga terjadinya

penambahan anggaran di masing-masing Suku Badan Daerah Kota Administrasi. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
**Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada
 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN	REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA		NAIK / TURUN	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Rp.	%
BELANJA BARANG DAN JASA	17,071,171,895	13,804,938,213	3,266,233,682	23.67
Belanja Bahan Pakai Habis	5,335,632,412	3,500,679,167	1,748,953,245	49.60
Belanja Jasa Kantor	9,721,897,165	9,256,121,349	465,775,817	5.03
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1,636,022,713	608,001,972	1,028,020,741	169.08
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21,415,000	-	21,415,000	100.00
Belanja Pemeliharaan	368,204,605	374,135,726	(15,931,121)	(4.26)

4.1.2.3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 3.416.591.225,00 dan Rp 3.272.132.658,-. Pada tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah menganggarkan belanja hibah sebesar Rp 3.699.557.260,00. Adapun belanja hibah ini diberikan kepada Badan dan Yayasan yang berada dibawah naungan Sekretariat Dewan Pengurus KOPRI yaitu Badan Cendana Bakti Jaya, Yayasan KORPRI Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Werdatama Jaya Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi hibah pada Badan Cendana Bakti Jaya sebesar Rp 2.326.247.275,00 dikarenakan adanya pengembalian sebesar Rp 189.003.785,00 , untuk Yayasan KORPRI Provinsi DKI Jakarta terealisasi sebesar Rp115.481.200,00 dengan pengembalian sebesar Rp 6.000.000,00 dan untuk Perkumpulan Werdatama Jaya

Provinsi DKI Jakarta terserap sebesar Rp974.862.750,00 dengan pengembalian sebesar 87.962.250,00.

Rincian realisasi belanja hibah pada 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Rincian Belanja Hibah Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp,-)	REALISASI HIBAH		NAIK / TURUN	
		31 DESEMBER 2023 (Rp,-)	31 DESEMBER 2022 (Rp,-)	Rp.	%
BELANJA HIBAH	3.899.557.280	3.416.891.225	3.272.132.858	144.458.567	4.41
Belanja Hibah Badan Cendana Bakti Jaya	2.515.251.000	2.326.247.275	2.337.346.704	(11.099.429)	(0.47)
Belanja Hibah Yayasan KORPRI DKI Jakarta	121.481.200	115.481.200	-	115.481.200	-
Belanja Hibah Perkumpulan Werdalama Jaya Provinsi DKI Jakarta	1.062.825.000	974.862.750	934.785.954	40.076.796	4.29

4.1.2.4. Belanja Modal

Realisasi Belanja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp meningkat Rp 2.575.913.603,- atau meningkat 0.08% dibandingkan belanja pegawai pada 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.393.631.270,00.

Rincian realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.4

URAIAN	REALISASI BELANJA MODAL		NAIK / TURUN	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Rp.	%
BELANJA MODAL	2.575.913.603	2.393.631.270	182.282.333	0.08
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	2.575.913.603	2.393.631.270	182.282.333	0.08

4.2. Neraca

Neraca menggambarkan informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional instansi, dan modal pada waktu tertentu.

4.2.1. Aset

4.2.1.1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Tabel 4.5

NO	ASET LANCAR	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / Turun	%
1	Kas di bendahara pengeluaran	-	-		
2	Belanja Barang Dibayar Dimuka	20.318.595	8.194.127	12.124.468	147,97
3	Persediaan	1.067.747.194	873.827.950	193.919.244	22,19
	Jumlah	1.088.065.789	882.022.077	206.043.712	23,36

Badan Kepegawaian Daerah hanya mempunyai aset lancar yang terdiri dari persediaan *stock opname* sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp 1.067.747.194,00 dan belanja dibayar dimuka berupa sisa saldo BBM yang belum terpakai periode 31 Desember 2023 sebesar Rp 20.318.595,00.

4.2.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI

Jakarta , dinilai, dan dicatat sebesar nilai rupiahnya, meliputi:

- Seluruh kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- Seluruh kas yang merupakan sisa uang muka kerja yang masih berada di bendahara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang belum dipertanggungjawabkan/disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal neraca;
- Seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas daerah;

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar RP 0 dan Rp 0 (NIHIL).

4.2.1.1.2. Piutang

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0 (NIHIL).

4.2.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud

mendukung kegiatan operasional SKPD dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 4.6 Persediaan

NO	Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / Turun	%
1	Barang Pakai Habis	1.067.747.194	873.827.950	193.919.244	22,19
2	Barang Tak Pakai Habis	-	-	-	-
3	Barang Bebas Dipakai	-	-	-	-
	Jumlah	1.067.747.194	873.827.950	193.919.244	22,19

Persediaan per 31 Desember 2023 (unaudited) dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 1.067.747.194,00 dan Rp 873.827.950,00 Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta . Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2023 dengan menggunakan FIFO. Adapun rincian persediaan tersebut terlampir pada lampiran 4.

4.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang meliputi:

- Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
- Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Investasi Jangka Panjang Tahun 2023 dan Tahun 2022.

4.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: (tambahkan kenaikan dan penurunan)

Tabel 4.7 Aset Tetap

NO	ASET TETAP	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK / (TURUN)	
				Rp.	%
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan mesin	24.078.573.949	21.399.621.801	2.678.952.148	12,51
3	Gedung dan bangunan	-	-	-	-
4	Jalan, Ingasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	155.295.450	155.295.450	-	-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(19.790.561.779)	(18.381.224.499)	(1.409.337.280)	7,67
	Jumlah	4.441.307.620	3.173.692.752	1.267.614.868	20

Sampai dengan bulan Desember Tahun 2023, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan belanja modal, yaitu peralatan dan mesin melalui e-katalog.

Kenaikan belanja Peralatan dan Mesin tersebut terdiri dari:

- a. Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 17.791.566.643,00;
- b. Belanja Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp 713.048.997,00;

- c. Belanja Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp 667.351.460,00;
- d. Belanja Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 844.693.884,00;
- e. Belanja Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp 633.362.860,00; dan,
- f. Belanja Sekretariat KORPRI sebesar Rp 2.044.505.773,00;

4.2.1.3.1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta disajikan pada table berikut.

Tabel 4.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK / (TURUN)	
				Rp.	%
	Peralatan dan Mesin	(19.676.361,779)	(18.267.044,499)	(1.409.337,280)	7,72
	Aset Tetap Lainnya	(114.180.000)	(114.180.000)	-	-
	Jumlah	(19.790.561,779)	(18.381.224,499)	(1.409.337,280)	-

4.2.1.4. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Sampai dengan

31 Desember 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Dana Cadangan.

4.2.1.5. Aset Lainnya

Aset lainnya mencakup aset tak berwujud dan aset lain-lain, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan Aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki Aset Lain-lain senilai Rp.32.553.308,00.

Tabel 4.9 Aset Lainnya

NO	ASET TETAP	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK / (TURUN)	
				Rp.	%
1	Aset Rusak Berat	1,281,902,940	1,082,093,837	199,809,103	18.47
2	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	100,927,600	100,927,600	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(1,249,349,632)	(1,048,944,329)	(200,405,303)	19.11
4	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(100,927,600)	(100,927,600)	-	-
Jumlah		32,553,308	33,149,508	(596,200)	(1.80)

4.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Untuk penyusunan Neraca, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban jangka pendek pada kewajiban Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6.058.707.137,00 yang merupakan utang belanja pegawai bulan Desember 2023 yang dibayarkan di bulan Januari 2024.

Adapun belanja pegawai tersebut berupa TPP beban Kerja bulan Desember 2023 sebesar Rp 209.645.764,00 dan TPP Prestasi Kerja bulan Desember 2023 sebesar Rp 5.849.061.373.

4.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban.

Tabel 4.10 Ekuitas

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	Naik / Turun	%
1	3	4	3	4
Ekuitas - LO RK PPKD	(2.096.626,476)	(2.177.348,645)	80.722,169	(4)
Jumlah Ekuitas Awal	(2.096.626,476)	(2.177.348,645)	80.722,169	(4)
Surplus/Defisit LO	(142.907,502,645)	(605.856,264,578)	462.948,761,933	(76)
Mutasi RK PPKD	144.509,560,009	605.936,986,747	(461.427,426,738)	(76)
Koreksi Ekuitas	(2.211,308)	-	(2.211,308)	100
Perubahan Ekuitas	1.599,846,056	80,722,169	1.519,123,887	(53)
Ekuitas Akhir:				
Ekuitas - LO	(145,006,340,429)	(608,083,613,223)	463,027,272,794	(76)
RK PPKD	144,509,560,009	605,936,986,747	(461,427,426,738)	(76)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	(496,780,420)	(2,096,626,476)	1,599,846,056	(152)

Ekuitas awal merupakan nilai LO yang tersaji pada laporan keuangan per 1 Januari 2023 yang merupakan nilai Ekuitas-LO akhir di neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.096.626.476,00.

Perubahan ekuitas merupakan aktivitas penambahan dari surplus/defisit LO, mutasi RK PPKD dan koreksi ekuitas sebesar Rp 4.599.846.056,00.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 di Neraca sebesar Rp (496.780.420,00) adalah nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan saldo Ekuitas Akhir.

4.3. Laporan Operasional

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

4.3.1. Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, nilai Defisit dari Kegiatan Operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp 142.884.513.229,00 Adapun nilai Defisit tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp. 0.- dikurang dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp 142.884.513.229,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO kelompok kegiatan operasional sebagai berikut:

4.3.1.1. Pendapatan LO

Pendapatan adalah Hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki anggaran Pendapatan LO pada Tahun 2023.

4.3.1.2. Beban Operasi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Beban Operasi LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Rekapitulasi Beban Operasi Tahun Anggaran 2023 digambarkan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.11

Rekapitulasi Beban Operasi

Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Total Beban
1	Beban Pegawai	120.898.028.310
2	Beban Barang	5.072.103.820
3	Beban Jasa	11.379.354.878
4	Beban Pemeliharaan	358.204.605
5	Beban Perjalanan Dinas	-
6	Beban Bunga	-

No.	Uraian	Total Beban
8	Beban Hibah	3.416.591.225
9	Bebah Bantuan Sosial	-
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.783.219.807
11	Beban Penyisihan Piutang	-
12	Beban Lain-Lain	-
Jumlah Beban Operasi		142.907.502.645

a. Beban Pegawai

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki Beban Pegawai Rp 120.898.028.310,00 pada tahun 2023.

b. Beban Barang

Beban barang merupakan belanja atas barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Beban Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.072.103.820,00.

c. Beban Jasa

Beban jasa diantaranya terdiri dari beban jasa kantor dan beban tenaga ahli/ instruktur/ narasumber. Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 11.379.354.878,00.

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 358.204.605,00. Beban pemeliharaan terdiri dari beban pemeliharaan computer/PC, beban pemeliharaan komputer/notebook/laptop, beban pemeliharaan printer dan beban pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional.

e. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan hibah yang diberikan kepada Yayasan dibawah naungan Sekretariat KORPRI yang penyerahannya diatur dalam SK Gubernur Tahun 2023.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.783.219.807,00.

4.4. **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, perubahan ekuitas, ekuitas akhir.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp (473.791.004,00) dengan mutasi sebagai berikut:

Ekuitas Awal	(2.096.626.476)
Ekuitas – LO	(608.033.613.223)
RK PPKD	(605.936.986.747)
Perubahan Ekuitas	1.622.835.472
Surplus/Defisit LO	(142.884.513.229)
Mutasi RK PPKD	144.509.560.009
Koreksi Ekuitas	(2.211.308)
Ekuitas Akhir	(473.791.004)
Ekuitas – LO	(144.983.351.013)
RK PPKD	144.509.560.009
Ekuitas Akhir	(473.791.004)

1. **Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada neraca per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (2.096.626.476,00).

2. Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.622.835.472
Perubahan Ekuitas berasal dari Defisit LO, Mutasi RK PPKD dan Koreksi Ekuitas.

3. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (473.791.004,00)
Ekuitas Akhir berasal dari Ekuitas –LO dan RK PPKD.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

5.1. Penjelasan Umum

5.1.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta



Susunan Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan, Bidang Pengembangan, Bidang Kesejahteraan dan Pensiun, Bidang Pengendalian, Suku Badan Daerah Kota, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional yang masing masing memiliki

tugas pokok dan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian.

5.1.2. Domisili

- a) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bertempat di Jalan Medan Merdeka Selatan No 8-9, Gambir, Jakarta Pusat di dalam Gedung Balaikota Jakarta Blok G Lantai 20-21.
- b) Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat beralamat di Jl. Tanah Abang I No. 1 Jakarta Pusat Blok A, lantai 4, Jakarta Pusat 10160;
- c) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat beralamat di Jl. Raya Kembangan No. 2 Gedung Blok B Lt. 13, Jakarta Barat
- d) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur beralamat di Jl. Dr. Sumarno Blok A Lantai 7 Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950;
- e) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Blok C Lantai 4, Jakarta Selatan 13950;
- f) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara beralamat di Jl. Yos Sudarso No.27-29 Blok P Lantai 10. Kel. Kebon Bawang Kec. Tg.Priok, Jakarta Utara 14320;
- g) Sekretariat KORPRI Provinsi DKI Jakarta beralamat di Gedung Dinas Teknis, Jalan Abdul Muis No 66 lantai 15, Jakarta Pusat 10160.

5.2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah, yang tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 256 Tahun 2016 dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 124 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian daerah, BKD berfungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian pegawai;
- d. Penyusunan formasi kebutuhan pegawai;
- e. Pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai;
- f. Pelaksanaan penempatan dan mutasi pegawai;
- g. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
- h. Pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
- i. Pengembangan karir pegawai;
- j. Penyelenggaraan penilaian/ pengujian dalam rangka deskripsi manajerial (*soft competency*) dan potensi pegawai;
- k. Pelaksanaan konseling pegawai;
- l. Penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi manajerial (*soft competency*);
- m. Penyusunan standar kompetensi manajerial (*soft competency*);
- n. Pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai;
- o. Penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai;
- p. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- q. Pengelolaan sistem informasi manajemen dan dokumen kepegawaian daerah;
- r. Pengelolaan dan penyajian data informasi kepegawaian daerah;
- s. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

- t. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Badan Kepegawaian Daerah;
- u. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Kepegawaian Daerah;
- v. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Kepegawaian Daerah; dan
- w. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2023, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Capaian anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 pada laporan keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta Suku Badan Kepegawaian Daerah dan UPT pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 144.090.488.709,00 atau mencapai 96.49% dari alokasi anggaran sebesar Rp 149.328.774.467,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (Audited).

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Daerah dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 5.561.867.296,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 1.088.006.368,00, Aset Tetap sebesar Rp 4.441.307.620,- dan Aset Lainnya sebesar Rp 32.553.308,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas LO masing-masing sebesar Rp 6.035.658.300,00 dan Rp (144.983.351.013,00). RK PPKD sebesar Rp 144.509.560.009,00. Sehingga di dapat nilai Ekuitas sebesar Rp (473.791.004,00). Total kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp 5.561.867.296,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan. Jumlah beban untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 142.907.502.645,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (142.907.502.645,00). Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan Kegiatan Non-Operasional.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp (2.096.626.476,00) ditambah Perubahan Ekuitas sebesar Rp 1.599.846.056,00. Sehingga Ekuitas Akhir Entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (496.780.420,00).